

Kebijakan Pendidikan Jepang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam

Cindy Mahfudhotul Awwaliyah^{1*}, Difaa'atul Mutammimah^{2*}, Moh. Kusno³

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah^{1,2,3}, Lamongan, Indonesia

Email: cindymhfdhtl23@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
Submitted: 18-05-2025 Revised: 28-05-2025 Published: 03-07-2025	<i>Japanese education is known for its disciplined, practical education system that focuses on improving the quality of individuals and groups. In Indonesia, there are several Japanese policies implemented, especially in terms of school management, learning methods and a culture of hard work. This study aims to analyze how the influence of Japanese education policies implemented in Indonesia on the Islamic education system, both from the positive side and the challenges. Using a library research approach, this study relies on literature study and policy analysis to understand how the Japanese education system is adapted to the Islamic education situation. The results show that concepts such as high discipline and active learning have a positive impact on teaching effectiveness in Islamic schools. However, there are challenges in maintaining a balance between the positive secular nature of Japanese education and the Islamic values that form the basis of Islamic education in Indonesia. Therefore, an adaptation strategy that considers the synergy between the two systems is needed so that Islamic education retains its identity while utilizing the principles of Japanese education to improve the quality of learning. This research provides insights for education stakeholders in formulating policies that are more contextual and inclusive for the advancement of Islamic education in Indonesia.</i>
Keywords: Japanese Education Policy Islamic Education System Adaptation of Islamic Education	

Abstrak

Pendidikan Jepang ini dikenal dengan sistem pendidikan yang disiplin, praktis, dan fokus pada peningkatan kualitas individu serta kelompok. Di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan Jepang yang diterapkan, terutama dalam hal manajemen sekolah, metode pembelajaran serta budaya kerja keras. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaruh kebijakan pendidikan Jepang yang diterapkan di Indonesia terhadap sistem pendidikan Islam, baik dari sisi positif maupun tantangannya. Dengan menggunakan pendekatan library reseach, penelitian ini mengandalkan studi pustaka dan analisis kebijakan untuk memahami bagaimana sistem pendidikan Jepang diadaptasi dalam situasi pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep seperti disiplin yang tinggi dan pembelajaran aktif berdampak positif pada efektivitas pengajaran di sekolah-sekolah Islam. Namun ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antar positif pendidikan Jepang yang bersifat sekuler dan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi yang mempertimbangkan sinergi antara kedua sistem agar pendidikan Islam tetap mempertahankan identitasnya sambil memanfaatkan prinsip-prinsip pendidikan Jepang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual dan inklusif untuk kemajuan pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Jepang, Sistem Pendidikan Islam, Adaptasi Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Era Jepang merupakan peralihan dari era Kolonial Belanda yang merupakan titik balik dalam sejarah. Penderitaan-penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tidak pernah berhenti. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara penjajahannya. Kedatangan Jepang di Hindia Belanda (Indonesia) berkaitan dengan ideologi yang dianut Jepang yaitu *Hakko Ichiu*, yang memiliki

makna delapan arah mata angin di bawah satu atap kekuasaan kemaharajaan Jepang. Berdasarkan makna tersebut, erdapat cita-cita untuk membentuk suatu lingkungan kemakmuran bersama yang didominasi oleh Jepang dan meliputi sebagian besar dunia (Abdurakhman & Pradono, 2019).

Penjajahan Jepang di Indonesia (1942-1945) menandai perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Berbeda pada saat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda yang menerapkan sistem diskriminatif dan terbatas bagi pribumi. Sedangkan pemerintahan militer Jepang yang menerapkan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada mobilitas rakyat untuk kepentingan Asia Timur Raya. (Kholik, 2025) Pendidikan yang dilakukan oleh Jepang dijadikan sebagai alat propaganda untuk menanamkan semangat nasionalisme Jepang, kedisiplinan, serta loyalitas kepada kaisar. Namun, di sisi lain kebijakan pemerintahan militer Jepang juga membuka ruang-ruang baru bagi pendidikan pribumi, termasuk dalam pendidikan Islam, yang sebelumnya sangat dibatasi oleh pemerintahan kolonial Belanda.

Pemerintahan Jepang memberikan ruang lebih besar kepada lembaga-lembaga Islam. Tidak seperti pemerintahan kolonial Belanda yang justru mencurigai aktivitas pendidikan Islam serta membatasi ruang gerak pesantren dan madrasah. Jepang relatif akomodatif terhadap lembaga-lembaga Islam, seperti pesantren dan madrasah yang mulai mendapatkan ruang untuk tumbuh, dan bahkan tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Wahid Hasyim, K.H. Hasyim Asy'ari dan lainnya mulai dilibatkan dalam organisasi-organisasi resmi Jepang seperti Masyumi dan Jawa Hokokai.

Kebijakan Jepang ini berdampak pada dua sisi, Jepang memberikan peluang kepada pendidikan Islam untuk tampil ke permukaan, memperkuat infrastruktur, serta mengembangkan jaringan social dan politik. Namun di sisi yang lain tetap berada dalam kerangka kontrol dan pengawasan ketat dengan orientasi utama kepentingan Jepang. Perubahan ini membawa implikasi terhadap arah pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan posisi pendidikan Islam dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia saat itu.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan Jepang yang diterapkan di Indonesia, dengan fokus khusus pada dampaknya terhadap pendidikan Islam. Kajian ini tidak hanya menelusuri perubahan struktural dalam sistem pendidikan, tetapi juga mengevaluasi bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam mengalami transformasi selama masa pendudukan, dan bagaimana warisan dari periode ini membentuk arah perkembangan pendidikan Islam di masa-masa berikutnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Pendekatan ini sangat sesuai karena penelitian berfokus pada analisis deskriptif dan interpretatif terhadap fenomena historis, sosial, dan budaya, tanpa mengutamakan angka atau statistik. Metode studi kepustakaan (library research) digunakan sebagai strategi utama dalam pengumpulan data. Dalam konteks ini, penelitian menggali berbagai sumber tertulis. Termasuk buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pemikiran tokoh-tokoh yang terlibat dalam dunia pendidikan pada masa tersebut. Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Teknik ini digunakan untuk mengkaji dan menginterpretasikan teks-teks atau dokumen yang dikumpulkan. Setiap informasi faktual yang ditemukan dicatat secara rinci dan dijelaskan dengan akurat, mengingat pentingnya keandalan dan ketepatan dalam menyajikan data historis. Proses analisis isi ini memungkinkan peneliti untuk memetakan pola-pola utama, tema-tema yang muncul, serta hubungan antar elemen. Setelah informasi terkumpul, data yang ada akan dianalisis secara kritis dan dikombinasikan untuk memahami konteks yang lebih besar dari permasalahan yang diteliti. Proses ini melibatkan penyusunan data yang relevan menjadi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Jepang di Indonesia

Pada awal pendudukan Jepang (1942-1945), Jepang menutup sekolah-sekolah Belanda dan menggantinya dengan sekolah baru yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Pemerintah militer Jepang menerapkan sistem pendidikan yang berbeda dari era kolonial Belanda dengan memberikan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat pribumi. Mereka menyederhanakan sistem pendidikan dan menghapus dualisme pendidikan, sehingga lebih mudah dijalankan tanpa kontrol ketat dari pemerintah. Selain itu, kebijakan ini juga digunakan oleh Jepang sebagai alat propaganda untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia dengan menciptakan kesan bahwa pendidikan lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua orang, tanpa adanya pelapisan sosial. Langkah ini membantu membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sekaligus memperkuat pengaruh Jepang di Indonesia. (Sugiyono, 2020)

Saat Jepang menggantikan Belanda sebagai penguasa di Indonesia, terjadi perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Banyak aturan dan sistem diubah atau dihapus. Jepang awalnya ingin menerapkan sistem *Nipponize* (Jepangisasi) seperti pendidikan di Manchuria, tetapi karena mengalami kegagalan, mereka akhirnya menggabungkan kurikulum lokal dengan kurikulum Jepang di Indonesia. Tujuannya adalah menyesuaikan pendidikan dengan kondisi setempat sambil tetap membawa pengaruh Jepang. (Ramadhani, 2021)

Setelah Jepang menggantikan Belanda sebagai penguasa di Indonesia, Jepang menghapus sistem pendidikan yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda dan menggantikannya dengan sistem baru yang mereka buat sendiri. Untuk menata ulang pendidikan, pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan guna menyesuakannya dengan tujuan dan kepentingan mereka di antaranya yaitu:

- a. Jepang menyesuaikan sistem pendidikan agar lebih selaras dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Hal ini dilakukan karena sebelumnya mereka gagal menerapkan Jepangisasi pendidikan di Manchuria. Di Indonesia, mereka mengadopsi pendekatan berbeda dengan menggabungkan kurikulum lokal dan kurikulum Jepang, sehingga pendidikan tetap mencerminkan budaya setempat sambil memenuhi kepentingan Jepang.
- b. Jepang melibatkan tenaga pribumi dalam bidang pendidikan dengan menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai penasihat, yang bertujuan untuk memperoleh simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia.
- c. Jepang mengadakan pelatihan bagi para guru agar memahami tujuan pemerintahan mereka. Pada awalnya, banyak guru belum memahami konsep pendidikan baru yang diterapkan. Oleh karena itu, pelatihan diberikan dengan fokus pada beberapa aspek utama, seperti semangat Jepang dan kemiliteran, indoktrinasi ideologi, ilmu geografi dengan sudut pandang geopolitik, serta pengajaran bahasa, sejarah, dan budaya Jepang. Selain itu, pelatihan juga mencakup lagu dan olahraga khas Jepang untuk memperkuat pengaruh budaya mereka dalam pendidikan.
- d. Pemerintah Jepang menghapus sekolah-sekolah berbahasa Belanda dan melarang penggunaan bahasa serta materi dari Belanda maupun negara Eropa lainnya. Akibatnya, komunitas Peranakan Tionghoa diarahkan untuk kembali belajar di sekolah-sekolah berbahasa Mandarin yang berada di bawah pengawasan Hua-Chino Tsung Hui.
- e. Pemerintah Jepang secara rutin mengunjungi dan memberikan bantuan kepada pondok pesantren hampir setiap minggu. Langkah ini bertujuan untuk mempererat hubungan dengan para pemimpin pesantren, sehingga Jepang dapat memperkuat kedudukannya dengan dukungan dari para kiai.
- f. Pembentukan barisan Hizbullah diizinkan oleh Jepang untuk diberikan pelatihan dasar semikemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin. Selain itu, Jepang juga memberikan izin untuk pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, yang dibimbing oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Bung Hatta.
- g. Jepang memberi izin kepada ulama dan pemimpin nasionalis untuk bergabung dengan barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang nantinya berkembang menjadi cikal-bakal TNI di era Indonesia Merdeka.

- h. Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) di izinkan beroperasi, tetapi kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang melibatkan dua ormas besar islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
- i. Pada masa Belanda Kantor *Voor Islamistische Zaken* yang sebelumnya dikelola oleh kaum orientalis Belanda diubah menjadi Sumubi dan kepemimpinannya diberikan kepada rakyat Indonesia. Salah satu tokoh Islam yang menjadi pimpinannya, yakni K.H. Hasyim Asy'ari. Selain itu, organisasi Islam yang sudah ada di zaman Belanda yang diurus oleh Belanda kemudian Jepang juga memberikan hak penuh kepada umat Islam untuk mengelola organisasi Islam yang sebelumnya di kendalikan oleh Belanda, yang secara langsung dipercayakan kepada K.H. Hasyim Asy'ari. (Ramadhani, 2021).

Setelah berbagai kebijakan Pendidikan di Indonesia ditetapkan, siswa diwajibkan oleh Jepang untuk mengikuti sejumlah aktivitas setiap pagi. Aktivitasnya sebagai berikut:

1. Lagu kebangsaan Jepang dinyanyikan.
2. Bendera dikibarkan dan hormat kepada Kaisar Jepang.
3. Melaksanakan Dai Toa (bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya).
4. Melaksanakan Taiso (senam jepang).
5. Melaksanakan pelatihan fisik dan militer.
6. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, sementara Bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib, sedangkan bahasa Belanda, Inggris, dan bahasa Eropa lainnya dilarang untuk diajarkan.

Kebijakan Jepang yang menghapus diskriminasi menyebabkan peningkatan jumlah siswa, sehingga diperlukan sistem pendidikan yang mampu menampung mereka. Setelah Belanda kehilangan kekuasaan, sekolah-sekolah mereka ditutup. Sebagai gantinya, Jepang mendirikan lembaga pendidikan baru dengan tingkatan dan mekanisme yang berbeda untuk menyesuaikan dengan kebijakan mereka. Adapun tingkatan lembaga pendidikan yang disediakan pemerintah Jepang untuk siswa, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko / Sekolah Rakyat*)
Masa studi selama 6 tahun. Sekolah ini merupakan perubahan dari sekolah dasar bagi pribumi yang sebelumnya berlangsung 3 atau 5 tahun pada masa Hindia Belanda. Sekolah Rakyat tersebar di berbagai kota dan desa, menggantikan sekolah-sekolah seperti Sekolah Desa, Sekolah Klas Satu, Sekolah Klas Dua, HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*), dan ELS (*Europeesche Lagere School*).
2. Pendidikan Lanjutan.
Terdiri dari dua jenjang pada masa Jepang, yaitu *Shoto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Pertama) dan *Koto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Tinggi), masing-masing dengan masa studi 3 tahun. Pendidikan ini bersifat umum dan bertujuan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan ke sekolah tinggi. Untuk masuk ke Sekolah Menengah Tinggi, siswa harus lulus ujian akhir Sekolah Menengah Pertama Negeri.
3. Pendidikan Kejuruan
Pada masa Jepang berfokus pada sekolah lanjutan dengan keterampilan vokasional, seperti pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. Selama pendudukan Jepang, didirikan Sekolah Pelayaran dan Sekolah Pelayaran Tinggi di Cirebon untuk mendukung bidang pelayaran.
4. Pendidikan Guru.
Terdiri tiga jenis sekolah untuk mendidik para calon guru, yakni Sekolah Guru 2 tahun (*Syoto Sihan Gakko*), Sekolah Guru 4 tahun (*Guto Suhan Gakko*), dan Sekolah Guru 6 tahun (*Koto Sihan Gakko*) (Makmur, 1993).
5. Pendidikan Tinggi
Pada masa pendudukan Jepang, hampir semua perguruan tinggi ditutup. Namun, beberapa sekolah tetap beroperasi, seperti Sekolah Kedokteran Tinggi (*Ika Dai Gakko*) di Jakarta yang dibuka kembali pada tahun 1943, serta Sekolah Ahli Obat (*Yaku Gakko*) di Jakarta dan Sekolah Kedokteran Gigi (*Shika Gakko*) di Surabaya. Pada 1944, Jepang mendirikan Sekolah Teknik Tinggi (*Kagyo Dai Gakko*) di Bandung dan Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor.

Kemudian, awal tahun 1945, Akademi Pemerintahan (*kenkoku Gakko In*) didirikan di Jakarta. (Hudaidah & Karwana, 2021)

Selain itu, pemerintah Jepang mendirikan 3 jenis sekolah untuk mendidik guru, yakni:

1. Sekolah Guru (*Sjootoo Sihan Gakkoo*) masa studi selama 2 tahun.
2. Sekolah Guru Menengah (*Cutoo Sihan Gakkoo*) masa studi selama 4 tahun.
3. Sekolah Guru Tinggi (*Kootoo Sihan Gakk*) masa studi selama 6 tahun. (Djoenoed Poesponegoro, 2019)

Jepang mendirikan sejumlah sekolah yang bertujuan tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga sebagai sarana menanamkan ideologi *Hakko Ichiu* atau konsep "kemakmuran bersama." Guru-guru memiliki peran penting dalam penyebaran ideologi ini. Mereka terlebih dahulu menjalani pelatihan di pusat pendidikan yang ada di Jakarta, di mana setiap calon guru harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Jepang sebelum mengikuti pelatihan. Setelah kembali ke daerah masing-masing, guru-guru diwajibkan mengajarkan *Hakko Ichiu* kepada para siswa dan menyebarkan nilai-nilai ideologi tersebut kepada masyarakat setempat. (Imran, 2012)

Selanjutnya pemerintah Jepang mendirikan beberapa lembaga pendidikan untuk mendidik para guru. Lembaga pendidikan tersebut diantaranya:

1. Sekolah Pendidikan Guru (SPG)
Berlokasi di lima kota, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, dan Blitar, sekolah ini bertujuan untuk mencetak tenaga pendidik.
2. Sekolah Guru Menengah Tinggi (SGMT)
SGMT merupakan jenjang lebih tinggi dari SPG dan berlokasi di Jakarta. Pendidikan berlangsung selama 4 tahun bagi lulusan SMP dan SGB, serta 1 tahun bagi lulusan SMA. Sekolah ini hanya menerima siswa laki-laki saja.
3. Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP)
SGKP dikhususkan bagi perempuan dengan masa studi 4 tahun, sekolah ini bertujuan untuk mencetak guru yang memiliki keterampilan khusus. (Ramadhani, 2021)

Pemerintah Jepang menetapkan dan mengubah berbagai kebijakan dalam pendidikan Indonesia dengan tujuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah menarik simpati masyarakat pribumi agar mereka bersedia membantu, mendukung, dan memenangkan Jepang dalam Perang Dunia. Selain itu, sistem pendidikan yang diterapkan juga berfungsi sebagai sarana untuk merekrut tenaga kerja tanpa upah (*Romusha*) serta prajurit yang akan membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu. Kebijakan ini dibuat karena saat Jepang menjajah Indonesia, mereka sedang berperang dan membutuhkan banyak tenaga tambahan.

Jepang melakukan berbagai perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia dengan alasan ingin memajukan pendidikan. Namun, di balik niat tersebut, mereka memiliki tujuan lain. Jepang menggunakan propaganda untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, dengan menyebarkan doktrin bahwa mereka datang sebagai pembebas dari penjajahan dan akan membawa kesejahteraan. Berbagai bentuk propaganda dilakukan Jepang untuk memperkuat citra mereka dan menarik simpati rakyat diantaranya:

1. Propaganda melalui siaran radio.
Jepang memperdengarkan lagu *Indonesia Raya* bersamaan dengan lagu kebangsaan mereka, *Kimigayo*, sebagai bagian dari strategi propaganda. Selain itu, mereka memanfaatkan radio untuk mempromosikan produk-produk Jepang serta menyebarkan pidato pemerintah terkait pendidikan dan berbagai informasi lainnya. Propaganda melalui radio berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi rakyat, mencakup beragam topik, termasuk pendidikan. Pidato-pidato ini bisa disampaikan langsung oleh pemerintah Jepang atau melalui tokoh nasionalis terkenal, seperti Ir. Soekarno.
2. Diperbolehkan mengibarkan Bendera merah putih.

Jepang mengizinkan pengibaran bendera Merah Putih berdampingan dengan bendera nasional mereka, serta memperbolehkan lagu *Indonesia Raya* dinyanyikan bersama *Kimigayo*. Langkah ini membuat rakyat percaya bahwa Jepang mendukung kemerdekaan Indonesia, seperti yang tercermin dalam slogan "Indonesia-Jepang sama-sama." Namun, kenyataannya, kemerdekaan masih bersifat tidak pasti dan bergantung pada kemenangan Jepang dalam

Perang Pasifik, sehingga ada kemungkinan Indonesia hanya akan merdeka jika Jepang mengizinkannya.

3. Program Pan-Asia

Jepang menjalankan propaganda melalui program Pan-Asia, yang bertujuan untuk menyatukan dan memajukan seluruh rakyat Asia di bawah kepemimpinan mereka. Melalui program ini, Jepang ingin membangun citra sebagai pemimpin Asia Timur Raya. Untuk memperkuat propaganda tersebut, Jepang meluncurkan gerakan "Tiga A" dengan slogan "Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia." Kampanye ini mulai digerakkan pada Mei 1942 dan pelaksanaannya dipercayakan kepada bangsa Indonesia, yaitu Mr. Syamsudin.

Sistem pendidikan Jepang di Indonesia tidak bertahan lama, hanya berlangsung selama satu setengah tahun. Pada September 1943, Jepang mengubah kebijakan dengan misi *Nipponisasi*, yang berfokus pada pelatihan militer bagi rakyat Indonesia. Latihan ini dilakukan di Jakarta selama tiga bulan dan mencakup berbagai kegiatan, seperti mengumpulkan bahan bangunan, membersihkan asrama dan bengkel Jepang, serta bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan Jepang. Selain itu, rakyat diwajibkan memiliki semangat perang dan bersumpah setia kepada Kaisar Jepang setiap pagi dalam bahasa Jepang, meskipun banyak yang tidak memahami isi sumpah tersebut. Untuk memperkuat pengaruh ideologi Jepang, para pemimpin pondok pesantren dan tokoh masyarakat diberikan pelatihan khusus selama satu bulan di Jakarta agar dapat menyebarkan ajaran Jepang kepada komunitas mereka.

Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan tidak menjadi prioritas seperti pada masa Hindia Belanda. Hal ini terbukti dengan penurunan jumlah sekolah akibat penutupan sekolah-sekolah yang sebelumnya berbasis Belanda. Jumlah sekolah dasar yang sebelumnya mencapai 21.500 berkurang menjadi 13.500, sekolah lanjutan turun drastis dari 850 menjadi hanya 20, dan perguruan tinggi hanya tersisa 4 institusi. Akibatnya, tingkat intelektualitas masyarakat menurun karena akses pendidikan yang semakin terbatas. Meskipun Jepang berusaha mengurangi angka buta huruf, hasilnya tidak signifikan dan angka buta huruf tetap tinggi. Dengan kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan yang diterapkan Jepang lebih berfokus pada kepentingan Perang Asia Timur Raya daripada meningkatkan kualitas pendidikan rakyat Indonesia.

Dengan hal ini, masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung singkat tetapi penuh dengan berbagai dampak, terutama dalam bidang pendidikan. Pada awalnya, rakyat Indonesia melihat Jepang sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Namun, dalam realitasnya, Jepang menggunakan propaganda untuk memperkuat pengaruh mereka, salah satunya melalui slogan Tiga A, (Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia). Selain itu, Jepang berusaha membangun citra sebagai "saudara tua" bagi bangsa Indonesia, sehingga masyarakat percaya bahwa mereka datang untuk membantu. Namun, semua kebijakan yang diterapkan, termasuk dalam pendidikan, lebih diarahkan untuk kepentingan Jepang sendiri daripada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, banyak masyarakat yang menganggap bahwa sistem pendidikan Indonesia di bawah pendudukan Jepang sangat buruk, terlihat dari berbagai perubahan dan kemunduran yang terjadi. Namun, di sisi lain, Jepang juga memberikan dampak positif, seperti menghapus pengaruh pendidikan Belanda yang sebelumnya kurang menguntungkan bagi rakyat kecil. Selain itu, meskipun pendudukan Jepang penuh dengan tekanan dan kekejaman, hal ini justru membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan secara penuh sepenuhnya. (Ramadhani, 2021)

Implikasi Kebijakan Pendidikan Jepang Terhadap Pendidikan Islam

Tidak seperti kedatangan Belanda yang berdasarkan kepentingan perdagangan dan misi penyebaran agama Kristen, kedatangan Jepang ke Indonesia murni dilandasi dengan politik dan militer. Tujuannya serupa dengan ideology imperialisme global secara umum. Perbedaan motif ini terlihat jelas, sehingga mempengaruhi kebijakan yang yang diberlakukan kemudian oleh

masing-masing negara penjajah. Di masa kolonial Belanda, sistem pendidikan dimanfaatkan untuk mendukung upaya kristenisasi. Sedangkan di era penjajahan Jepang menggunakan pendidikan sebagai alat Nipponisasi, yakni mengubah identitas budaya bangsa Indonesia, termasuk umat Islam, agar sesuai dengan budaya Jepang. Strategi ini juga pernah digunakan Jepang di wilayah Manchuria, Korea, dan Taiwan sebelum perang dunia II. (Syarif, 2019)

Sebelum Jepang menguasai Indonesia, struktur pendidikan masih bercampur antara sekolah umum yang masih mengikuti sistem Belanda dan sekolah instansi agama yang memiliki bentuk pola yang autentik berasal dari kalangan ulama. Namun terdapat juga perlakuan diskriminatif terhadap sekola-sekolah, di mana akses pendidikan diperuntukkan bagi penduduk Boemiputra, keturunan Arab, Tionghoa, serta warga Hindia Belanda dan keturunan bangsawan. Sistem pendidikan tersebut diterapkan oleh pemerintah colonial Belanda.

Setelah Jepang berkuasa banyak seklaah umum dan madrasah ditutup. Bahkan beberapa ditutup dengan sukarela oleh para pengelolanya karena merasa takut dan ingin menghindari Saekere (membungkukkan tubuh kepada arak Tokyo) yang diwajibkan untuk menghormati Kaisar Tenno Haika setiap pagi. Ritual ini bertentangan dengan ajaran Islam dan dianggap sebagai bentuk penyembahan yang tidak benar. Mereka yang menolak bisa mengalami pemukulan, penghinaan, serta cacian. (Hudaidah & Karwana, 2021)

Jepang kemudian mengganti semua sekolah peninggalan Belanda dengan lembaga baru yang seragam untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, madrasah dan pesantren tidak terkena kebijakan. Karena dua lembaga ini memiliki ciri khas. Sehingga Islam sangat beruntung memiliki keduanya, karena dapat terbebas dari pengawasan Jepang dan nashi tetap bisa beroperasi. Hal tersebut merupakan strategi Jepang untuk merebut simpati umat Islam. Jepang juga aktif mengunjungi pesantren-pesantren besar untuk menunjukkan perhatian terhadap pendidikan Islam. Secara historis pesantren telah dikenal sebagai pusat lahirnya ideologi perlawanan terhadap Belanda Sebuah sikap yang berbeda dari Belanda yang cenderung menekan lembaga-lembaga tersebut.

Menyadari posisi menguntungkan ini, madrasah dan pesantren berkembang pesat dan mengalami perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan kondisi sekola-sekolah umum yang banyak ditutup oleh Jepang dan menyebabkan jumlahnya sangat berkurang. Mahmud Yunus mencatat bahwa pendidikan Islam memiliki ruang gerak yang lebih luas pada masa Jepang dibandingkan era Belanda.

Jepang mengakui peran Islam yang signifikan di Indonesia, dan juga pengaruh ulama yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Jepang juga mendorong pembentukan orgnrisasi keagamaan seperti MIAI (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dan Syumubu, yang berfungsi mendukung pembaruan dan perkembangan pendidikan Islam. Para pejabat milliliter Jepang bahkan secara terbuka menyatakan akan melindungi Islam dan mendukung penyusunan kurikulum pendidikan Islam melalui dukungan dana dan fasilitas. (Hudaidah & Karwana, 2021)

Salah satu kebijakan besar Jepang adalah pelatihan militer untuk para santri. Jepang membentuk berbagai lembaga-lembaga pelatihan yang dimaksudkan sebagai wadah pengkaderan para militer beranggotaan rakyat. Lembaga yang dimaksud antara lain seperti Seindojo (panti pelatihan militer), Seinekurensyo (pusat latihan pemuda), Seindean (barisan pemuda), Keibodan (barisan pemuda polisi), peta (pembela tanah air), dan juga Hisbullah yang melibatkan para pemuda Islam dan kiai dalam kegiatan paramiliter. Pelatihan ini bertujuan membentuk kader yang siap membela Jepang, sekaligus mengindoktrinasi mereka dengan ideologi Jepang. (Syarif, 2019)

Namun, ketika posisi Jepang melemah di akhir perang Dunia II, pendekatan mereka berubah drastis. Jepang membekukan seluruh organisasi Islam, termasuk yang bergerak di bidang pendidikan. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di adrasah dan pesantren banyak yang terhenti, dan pendidikan Islam kembali mengalami keterbatasan. Jepang memfokuskan diripada persiapan perang Asia Timur Raya dan memobilisasi rakyat melalui program kerja paksa (Romusha) serta pembentukan organisasi pertahanan seperti Haiho dan PETA. Kondisi ini mulai melakukan perlawanan. Meski begitu, berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jkarta menjadi angin segar dalam perjuangan pendidikan Islam secara mandiri. Sementara itu, pesantren-pesantren di daerah yang jauh dari pengawasan langsung Jepang tetap bisa menjalankan aktivitas

pendidikannya, sehingga masih memiliki peluang untuk berkembang dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan Islam di masa itu. (Hudaidah & Karwana, 2021)

Respons Pendidikan Islam Terhadap Kebijakan Jepang

Jepang menampakkan diri pada babak pertama seakan-akan membela kepentingan Islam, yang merupakan siasat untuk kepentingan perang dunia II. Untuk mendekati umat Islam Indonesia dengan menempuh berbagai kebijaksanaan diantaranya:

1. KUA (kantor urusan agama) yang awalnya dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda diubah menjadi kantor sumubi yang dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari dari Jombang Jawa Timur.
2. Pondok-pondok pesantren besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar Jepang.
3. Pemerintahan Jepang mengizinkan pembentukan Hizbullah.
4. Pemerintahan Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta.
5. Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis dan diizinkan membentuk barisan pembela tanah air (PETA).
6. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut MIAI yang bersifat kemasyarakatan.

Niat pemerintah Jepang untuk tampil sebagai pembela kepentingan Islam hanyalah taktik untuk memobilisasi kekuatan baik Muslim maupun nasionalis Indonesia untuk melayani ambisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Ranah pendidikan, yang seharusnya berkembang pesat, sebagian besar terabaikan. Siswa di sekolah setiap hari hanya terlibat dalam latihan fisik, berbaris, kerja bakti masyarakat (romusha), bernyanyi, dan kegiatan serupa. Mereka kehilangan kesempatan pendidikan yang layak seperti yang diharapkan.

Tujuan utama pendidikan selama penjajahan Jepang pada dasarnya mencakup dua tujuan mendasar: untuk memperkuat iman Islam itu sendiri dan untuk membela hak asasi manusia melalui cara politik atau perlawanan bersenjata. Tujuan pendidikan Islam selama pendudukan Jepang meliputi yang berikut ini:

1. Tujuan dasar Muhammadiyah

Guna mendirikan masyarakat Islam sejati, dengan komitmen pada advokasi Islam dan prinsip-prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar.

2. INS (*Indonesische Nederlanshe School*)

Dirintis oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1899-1969 bertujuan untuk mendidik anak agar mampu berfikir logis, tekun bekerja, dan mengembangkan budi pekerti serta memupuk rasa persatuan.

3. Tujuan Nahdlatul Ulama

Sebelum berdirinya partai politik adalah berpegang teguh pada empat mazhab sambil melakukan tindakan-tindakan yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Islam.

Ramayulis menyatakan bahwa, reaksi Jepang terhadap pendidikan Islam cenderung lebih toleran, sehingga ada lebih banyak kebebasan dalam pendidikan dibandingkan pada era kolonial Belanda. Hal ini menciptakan peluang bagi pendidikan Islam untuk berkembang:

- a. Pada awal masa pendudukan Jepang, madrasah mengalami pertumbuhan pesat terutama dalam jumlah. Ini terlihat jelas di wilayah Sumatera yang dikenal dengan madrasahnyanya, yang mendapat inspirasi dari majelis ulama tinggi.
- b. Pendidikan agama di sekolah negeri mencakup materi tentang budi pekerti. Kesempatan ini memungkinkan para guru agama Islam untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan, termasuk konsep jihad melawan penjajah dalam pelajaran agama tersebut.
- c. Pendidikan tinggi Islam Pemerintah Jepang memberikan izin untuk membangun yayasan pendidikan tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, KH. Muzakkar, dan Bung Hatta. Meskipun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan menawarkan kebebasan beragama dan kesempatan dalam pendidikan, para ulama tetap menolak untuk

mengikuti pemerintah Jepang, terutama jika mereka mengganggu keyakinan umat. Hal ini dapat dilihat dalam perjuangan KH. Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri yang melawan kebijakan tidak sesuai dari Jepang yang diperintahkan untuk melakukan seikere (menghormati kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari). (Amin, 2019)

Respon umat Islam terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah Jepang tampaknya lebih inovatif. Dalam menghadapi pendekatan pendidikan Jepang, para ulama di Minangkabau sepakat untuk mendirikan Majelis Islam Tinggi Minangkabau. Dipimpin oleh M. Jamil Jambek dan Mahmud Yunus, organisasi ini berusaha untuk mengatur pendidikan agama, baik di madrasah maupun di sekolah-sekolah. Terkait dengan kurikulum, majelis tersebut menyusun rencana yang menjamin standar kualitas pendidikan agama. Pemerintah Jepang memberikan perhatian yang cukup besar terhadap setiap usulan dan rencana Majelis Islam Tinggi, terutama di bidang pendidikan.

Selama masa pendudukan Jepang, pengembangan Lembaga Awaliyah mengalami dorongan yang sangat signifikan. Majelis Islam Tinggi berperan pionir sekaligus motor penggerak utama dalam pendirian Lembaga awaliyah yang ditujukan untuk anak-anak berusia minimal tujuh tahun. Kurikulum pendidikan yang diterapkan di lembaga awaliyah ini menitikberatkan pada pembelajaran agama dan diadakan pada waktu sore. Penjadwalan ini bertujuan supaya anak-anak tetap mengikuti sekolah rakyat di pagi hari tanpa mengorbankan Pendidikan agama mereka. Seiring dengan berkembangnya jumlah Lembaga awaliyah, struktur Pendidikan agama menjadi lebih sistematis dan terorganisir yang memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan generasi dan memiliki fondasi keagamaan yang kuat serta keseimbangan dalam Pendidikan umum dan keislaman. (Malfi dkk., 2023)

Respon masyarakat memiliki berbagai reaksi terhadap kebijakan Pendidikan yang diterapkan Jepang. Pada awalnya, banyak orang tua menyambut baik kebijakan pendidikan Jepang karena lebih inklusif dibandingkan dengan masa kolonial Belanda. Kesempatan untuk bersekolah terbuka bagi semua, termasuk perempuan dan orang dewasa. Hal ini memberikan harapan baru bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami diskriminasi dalam pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi ekonomi yang memburuk akibat perang menghambat kemajuan pendidikan. Banyak siswa terpaksa berhenti sekolah untuk membantu keluarga mereka, terutama karena kebijakan romusha dan berbagai program kerja paksa yang Jepang terapkan. Pendidikan yang semula dianggap sebagai peluang, akhirnya menjadi korban dari prioritas perang Jepang, di mana tenaga kerja lebih dibutuhkan daripada peningkatan intelektual Masyarakat. (Kurasawa, 2015)

Meskipun ulama banyak yang mengikuti Pelatihan Ulama, tidak semua menerima kebijakan Jepang begitu saja karena dianggap menyengsarakan rakyat. Pada Februari 1944, terjadi perlawanan pertama kaum tani di Priangan terhadap kewajiban menyerahkan beras, yang dipimpin oleh seorang kiai NU dan murid-muridnya, tetapi akhirnya ditumpas dengan kejam. Pemberontakan berikutnya, yang dipimpin oleh para haji setempat, meletus di Jawa Barat pada Mei dan Agustus. Sejak saat itu, protes kaum tani semakin sering terjadi, meskipun masih bersifat terisolasi. (Ricklefs, 2001)

Selama masa pendudukan, rakyat desa mengalami kesulitan pangan yang sangat parah. Beras menjadi langka, sehingga mereka terpaksa menggantinya dengan bubur singkong. Untuk bertahan hidup, mereka juga mengonsumsi umbi badur, yang harus direndam garam terlebih dahulu agar aman dimakan, serta bonggol pisang dan daun kelapa yang disebut "bulung". (Lucas, 1989)

Para romusha dipaksa bekerja tanpa bayaran atau dengan upah yang sangat kecil. Kondisi kerja yang kejam, kurangnya makanan, dan tidak adanya jaminan kesehatan menyebabkan banyak dari mereka meninggal akibat kelaparan dan kelelahan. Akibatnya, mereka mengalami kekurangan gizi dan kematian dalam jumlah besar di tempat kerja. (Poesponegoro, 2011)

Para ulama yang bekerja di Shumuka tidak memiliki kekuasaan nyata dalam pemerintahan, melainkan hanya menjalankan program propaganda yang sudah ditentukan. Meskipun mereka berstatus sebagai pegawai resmi, posisi mereka tetap berada di pinggiran birokrasi dan kurang dipercaya oleh pemerintah Jepang. Selain itu, mereka selalu diawasi oleh pangreh praja dalam menjalankan tugasnya, termasuk saat berpidato, di mana tema pidato pun ditentukan oleh pemerintah. (Kurasawa, 2015)

Bangsa Indonesia awalnya berharap banyak pada Jepang, tetapi harapan itu berubah menjadi kekecewaan karena janji "kemakmuran bersama Asia Timur Raya" ternyata tidak terwujud. Para ulama pun menolak beberapa kebijakan Jepang, termasuk Seikerei, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Tokoh-tokoh seperti Dr. Abdul Karim Amrullah, Kiai Mas Mansur, dan Abdul Kahar Muzakkir menentang kebijakan ini. Akhirnya, Jepang mengizinkan para ulama untuk tidak melakukan Seikerei saat menghadiri pertemuan agama. (J, 1980)

Para pemuda berpendidikan di Jakarta dan Bandung mulai membentuk jaringan bawah tanah untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia. Dipimpin oleh Syahrir, mereka menyusun strategi karena menyadari bahwa kekuatan Jepang dalam perang semakin melemah. Melihat peluang ini, mereka berusaha menyatukan rakyat Indonesia agar siap menghadapi kemerdekaan Indonesia. (Ricklefs, 2001)

Latihan semi militer dan kemiliteran telah membentuk mentalitas pemuda, meningkatkan semangat juang mereka, serta membuat mereka lebih sadar akan kondisi masyarakat yang buruk. Pengalaman kolektif ini mendorong mereka untuk membela rakyat. Salah satu bukti nyata adalah perlawanan Peta di Blitar, yang dipimpin oleh Supriyadi, sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap situasi sosial saat itu. (Utomo, 1995)

Beberapa ulama melakukan perlawanan terhadap Jepang karena kebijakan yang menindas rakyat Indonesia. Salah satu pemberontakan terjadi di Cot Plieng Bayu, dekat Lhok Seumawe, yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil. Murid-muridnya, meski hanya bersenjatakan tradisional, berusaha melawan Jepang selama setengah hari. Setelah menguasai Cot Plieng, Jepang membalas dengan membakar masjid dan rumah warga serta menewaskan 86 murid Abdul Jalil. Abdul Jalil sendiri tewas bersama 19 pengikutnya saat berlindung di Blang Gampung Tengah. Pemberontakan lain terjadi di Singaparna, Tasikmalaya, pada Februari 1944, dipimpin oleh K.H. Zaenal Mustafa. Ia menolak bekerja sama dengan Jepang karena menganggap mereka sebagai musuh bangsa. (Poesponegoro, 2011)

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Jepang di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem pendidikan di beberapa aspek. Di sisi lain, Jepang memberikan ruang dan dukungan bagi institusi pendidikan Islam seperti Pesantren dan Madrasah yang sebelumnya terhambat oleh pemerintah Belanda. Hal ini akan mendorong perkembangan pendidikan Islam dengan lebih luas, seperti pembentukan sekolah menengah Islam dan keterlibatan pemimpin Islam dalam lembaga resmi. Sementara itu, dunia politik dikuasai oleh kepentingan politik Jepang, yang siap menggerakkan masyarakat mendukung Perang Asia Timur yang lebih luas melalui propaganda dan indoktrinasi. Walaupun pendidikan Islam mengalami kemajuan, tekanan militer, kerja paksa (Romusha), serta pengabaian hak atas pendidikan dasar mengakibatkan masalah dalam akses dan kualitas pendidikan secara umum. Meski ada peluang positif dari kebijakan Jepang, dampak jangka panjang tetap menciptakan tantangan bagi perkembangan pendidikan Islam lebih lanjut, khususnya dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah pengaruh ideologi asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurakhman, & Pradono, A. (2019). *Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA Kelas XI* (F. I. Kartika, Ed.). Penerbit Duta. <https://books.google.co.id/books?id=0cVHEAAAQBAJ>
- Amin, M. (2019). PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 10(2), 1-11.



- Djoenoed Poesponegoro, M. & N. N. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka.
- Hudaidah, & Karwana, M. A. P. (2021). *PENDIDIKAN DI INDONESIA MASA PENDUDUKAN JEPANG*.
<https://jurnal.um-palembang.ac.id/JDH/index>
- Imran, A. (2012). *Dibawah Pendudukan Jepang 1942-1945. Dalam Buku: Indonesia Dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi Jilid 6*. Ichtiar Baru.
- J, H. (1980). *Benda, Bulan Sabit Dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang(terjemah)*. Pt. Dunia Pustaka Jaya.
- Kholik, M. (2025). *Politik Pendidikan Islam*. AE Publishing.
- Kurasawa, A. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*. Komunitas Bambu.
- Lucas, A. E. (1989). *Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi*. PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Makmur, D. dkk. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. CV. Manggala Bhakti.
- Malfi, F., Sudirman, Zulmuqim, & Samad, D. (2023). Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Arus Jurnal Pendidikan*, 3(1), 25–30.
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup>
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup>
- Poesponegoro, M. D. dan N. N. (2011). *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Republik Indonsia (1942-1998)*. PT. Balai Pustaka.
- Ramadhani, S. (2021). Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 8(1), 10–23.
<https://doi.org/10.29408/jhm.v8i1.3410>
- Ricklefs, M. C. (2001). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Sugiyono, A. dkk. (2020). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. UNY Press.
- Syarif, M. (2019). *POLITIK PENDIDIKAN JEPANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA*. <https://ejurnal.unim.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/477/272>
- Utomo, C. B. (1995). *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. IKIP Semarang Press.